

Rabu, 18 Desember 2024



RAPAT KOORDINASI

HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN VISI MISI KEPALA DAERAH TERPILIH

Disampaikan Oleh:

Dr. Iendra Sofyan, ST., M.Si.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat





PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2029



DOKUMEN PERENCANAAN

Provincial Government
of West Java



2024

2025

Juni

November

Februari

Juni

RPJPD 2025-2045

RPJMD Teknokratis 2025-2029

RKPD 2025

KUA PPAS dan
Raperda APBD 2025

RPJMD 2025-2029 (Gubernur Terpilih)

Perubahan RKPD 2025

RKPD 2026



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH



GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun berfungsi sebagai instrumen untuk mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mendorong proses pembangunan, serta untuk mengantisipasi ketidakpastian masa depan;
- b. bahwa dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045 disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045 untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 yaitu "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan";
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2024



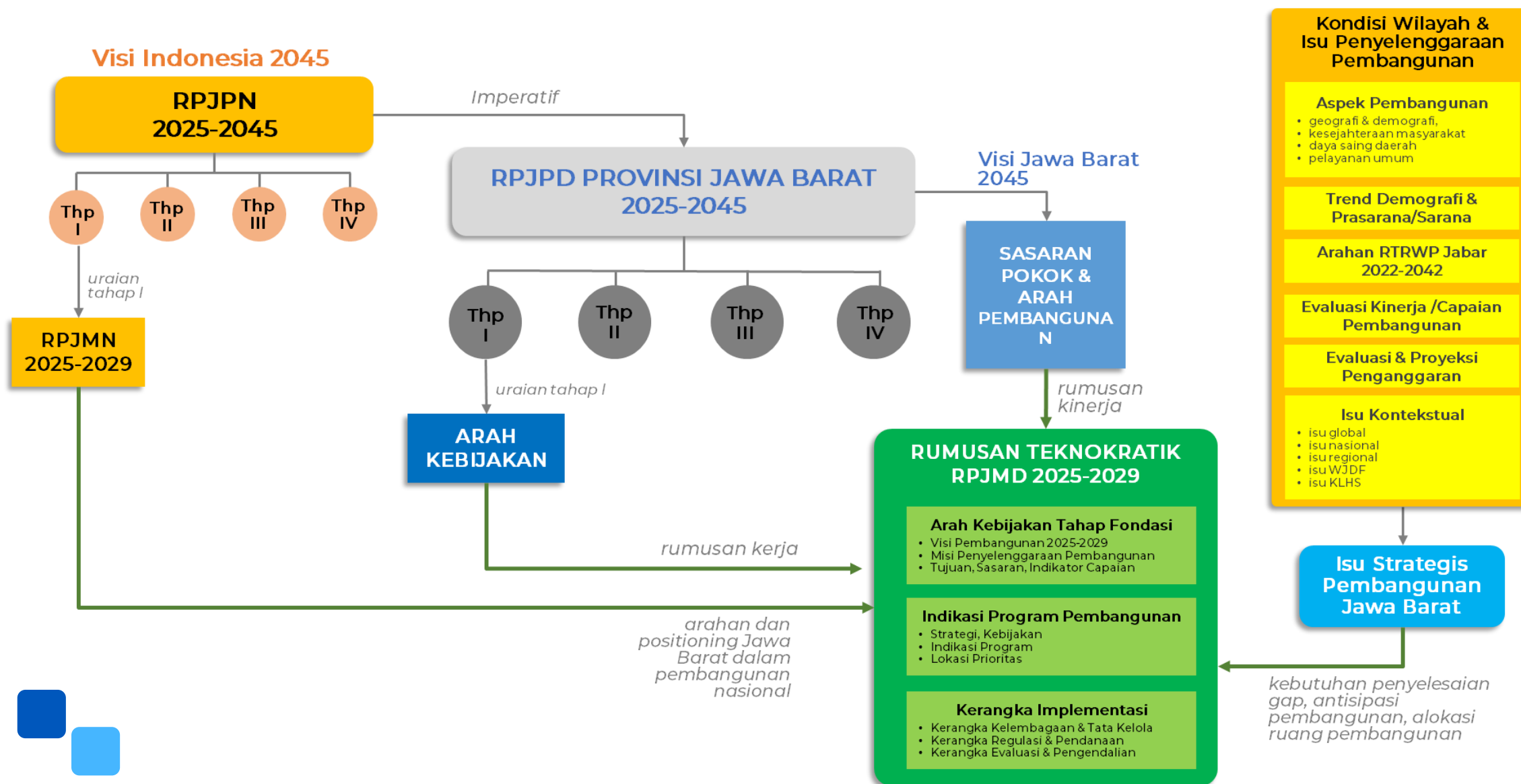
Rapat Pembahasan Tindaklanjut Hasil Evaluasi Ranperda RPJPD 2025 bersama Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat



Rencana Tindaklanjut:

Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
tentang RPJPD Tahun 2025-2045 kepada stakeholders

KERANGKA PERUMUSAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD 2025-2029



HASIL EVALUASI RPJMD 2018-2023



EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun Dasar		2021		2022		2023	
			2019	2020	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	68,5	68,5	68,6	70,52	69,1	72,21	69,6	74,1
2	Indeks Demokrasi	(poin)	69,09	71,32	70,79	70,79	71,79	83,34	72,79	N/A
3	Persentase Penduduk Miskin	%	6,82	8,43	7,77	7,97	7,67	7,9	7,54	7,62
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,04	10,46	10,45	9,82	10,16	8,31	9,69	7,44
5	Angka Harapan Hidup	(tahun)	72,85	73,04	73,06	73,23	73,09	73,52	73,11	73,8
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	(poin)	69,48	70,24	69,6	70,24	69,8	70,62*	70,3	N/A
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(poin)	89,26	89,2	89,3	89,36	89,42	89,8	90,02	N/A
8	Rata-Rata Lama Sekolah	(tahun)	8,37	8,55	8,58	8,61	8,6	8,78	8,64	8,83
9	Harapan Lama Sekolah	(tahun)	12,48	12,5	12,52	12,61	12,54	12,62	12,56	12,68
10	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	(poin)	50	50,00**	50	50	52	47*	54	N/A
11	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat	%	17,43	17,86	19,56	19,56	24,89	30,36	24,21	31,15
12	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	(poin)	77,5	88,4	72	72	74	87,5	75	100
13	Konsumsi listrik per kapita	(Kwh/kapita)	1.302	1.146,60	1.050	1.280,53	1.100	53,2	1.150	1.346,41
14	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	%	46,13	39,06	41	41	44	1.337,16	47	59,62
15	Indeks Desa Membangun	(poin)	0,67	0,69	0,7	0,72	0,71	0,7529	0,72	0,77
16	Usulan pembentukan Daerah persiapan otonomi baru (usulan)		0	3	0	0	1	3	2	1
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	(poin)	52,12	61,59	60,78	60,78	61,19	64,66	61,6	64,77
18	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	3,85	3,87	4,29	4,29	4,75	5,86	5,22	7,25
19	Indeks Penggunaan Air	(poin)	1,192	1,1927	1,1922	1,1922	1,191 2	53,37	1,190 2	1,1765
20	Indeks Risiko Bencana (IRB)	(poin)	152,13	145,81	149	134,94	147	118,78	144	123,16
21	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	(poin)	85,2	84,8	84	84	84,8	131,62	85,6	93,8
22	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak*		-	52,28	51,7	53,14	52,8	87	53,9	54,17
23	Nilai Tukar Petani (NTP)	(poin)	112,36	101,41	102,25	97,93	103,3	99,75	104,5 2	107,45
24	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	%	6,84	2,85	2,91	2,91	2,99	3,01	3,08	3,2
25	Laju pertumbuhan Sektor Industri	%	4,04	-4,22	2,78	2,78	3,4	7	3,72	4,74
26	Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	7,51	-7,94	3,23	3,23	4,01	4,22	4,45	4,36
27	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	(triliun rupiah)	535,72	493,96	501,52	501,52	515,3 1	576,9	531,8 7	644,38
28	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (persen)	%	21,1	19,41	19,9	21,67	20,5	21,62	21,1	28,84
29	N/A	N/A	N/A	N/A	BB	BB	N/A	N/A	N/A	A
					-78,01	-78,01				93,08
30	Tingkat efektivitas kerjasama Daerah (persen)	%	61,22	73,43	56	80,24	58	86,5	62	91,26

Kecenderungan realisasi dibawah target:

- TPT
Tingkat Pengangguran Terbuka
- IPP
Indeks Pembangunan Pemuda
- IRB
Indeks Risiko Bencana

SKENARIO RANGKAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 2025-2029 BERDASARKAN SASARAN VISI PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2045



SASARAN VISI	Indikator Sasaran Visi Pembangunan		Baseline 2025	Skenario 1		Skenario 2	Target 2045
				Proporsi	Target 2029	Target 2029	
1. Pendapatan per kapita meningkat	1	PDRB per kapita (Rp Juta)	57,41 - 57,77	105,04%	77,73 - 80,56	111,15 - 124,38	273,17 - 325,25
	2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	48,19	594,94%	54,14	160,03	495,56
	3	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	41,87 - 42,00	201,92%	44,22	42,47 - 42,94	46,43 - 47,60
2. Kemiskinan dan ketimpangan menurun	4	Tingkat Kemiskinan (%)	5,85 - 6,46	89,17%	4,01 - 4,46	4,03 - 4,47	0,09 - 0,34
	5	Rasio gini (Indeks)	0,383 - 0,390	102,90%	0,38 - 0,39	0,37 - 0,38	0,357 - 0,380
	6	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	12,72	59,16%	13,73	13,21	10,77
	7	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,96-5,37	106,34%	5,95	4,99 - 5,60	5,07-6,27
3. Kepemimpinan daerah di dunia Internasional meningkat	8	Indeks Daya Saing Daerah (poin)*	3,87	11,38%	3,30	4,15	5
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat	9	Indeks Modal Manusia (poin)	0,55	103,70%	0,63	0,59	0,69
5. Emisi GRK menurun menuju net zero	10	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,61	17,12%	10,68	23,92	75,84
	11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (poin)**	64,06	88,46%	66,36	66,07	72,08

Acuan Skenario 1: Proporsi Pencapaian Sasaran Jawa Barat terhadap Nasional

- Upaya untuk mempertahankan **target capaian** minimum berdasarkan **proporsi pencapaian** Provinsi Jawa Barat terhadap **target nasional**.
- Asumsi: bahwa Jawa Barat minimal akan menargetkan proporsi / kontribusi daerah terhadap nasional dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional

Acuan Skenario 2: Target Pembangunan Jawa Barat 2045

- ❑ Upaya untuk mencapai target jangka panjang yang ditetapkan pada Visi Jawa Barat 2045 dengan membagi proyeksi pencapaian kedalam kerangka waktu yang konsisten bagi pencapaian target setiap periode.
- ❑ Asumsi: Pencapaian pembangunan perlu dibagi merata di setiap tahapan pembangunan untuk mengantisipasi kebutuhan pemrograman berdasarkan proyeksi jangka panjang

SKENARIO RANGKAIAN KINERJA PEMBANGUNAN 2025-2029

BERDASARKAN SASARAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN JAWA BARAT



Indikator Makro Pembangunan		Baseline 2025	Skenario 1		Skenario 2	Target 2045
			Proporsi	Target 2029	Target 2029	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,96-5,37	106,34%	5,95 - 6,49	4,99 - 5,60	5,07-6,27
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,42 - 6,99	100,00%	6,24 - 6,99	6,34 - 6,96	6,1 - 7,1
3	Tingkat Inflasi (%)	3,3 - 3,9	100,00%	2,5	2,8 - 3,7	1,1 - 3,2
4	Prevalensi Stunting Balita (%)	19	97,94%	3,80	12,25	5
5	Gini Ratio	0,383 - 0,390	102,90%	0,38 - 0,39	0,37 - 0,38	0,357 - 0,380
6	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	6,61	17,12%	10,70	23,92	75,84

Keterangan untuk Skenario 2:

- Target (a) LPE berdasarkan pertimbangan mendekati target nasional dengan proporsi 100%
- Target (b) TPT berdasarkan proyeksi terhadap target RPJPD 2045
- Target (c) Tingkat Inflasi berdasarkan proyeksi terhadap target RPJPD 2045
- Target (d) Prevalensi Stunting berdasarkan proyeksi terhadap target RPJPD 2045
- Target (e) Gini Rasio berdasarkan kondisi ideal tingkat ketimpangan rendah di angka rasio <0,4 berdasarkan standar yang digunakan sesuai hasil kajian DPR-RI 2010

Acuan Skenario 1: Proporsi Pencapaian Sasaran Jawa Barat terhadap Nasional

- Upaya untuk mempertahankan **target capaian** minimum berdasarkan **proporsi pencapaian** Provinsi Jawa Barat terhadap **target nasional**.
- Asumsi: bahwa Jawa Barat minimal akan menargetkan proporsi / kontribusi daerah terhadap nasional dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional

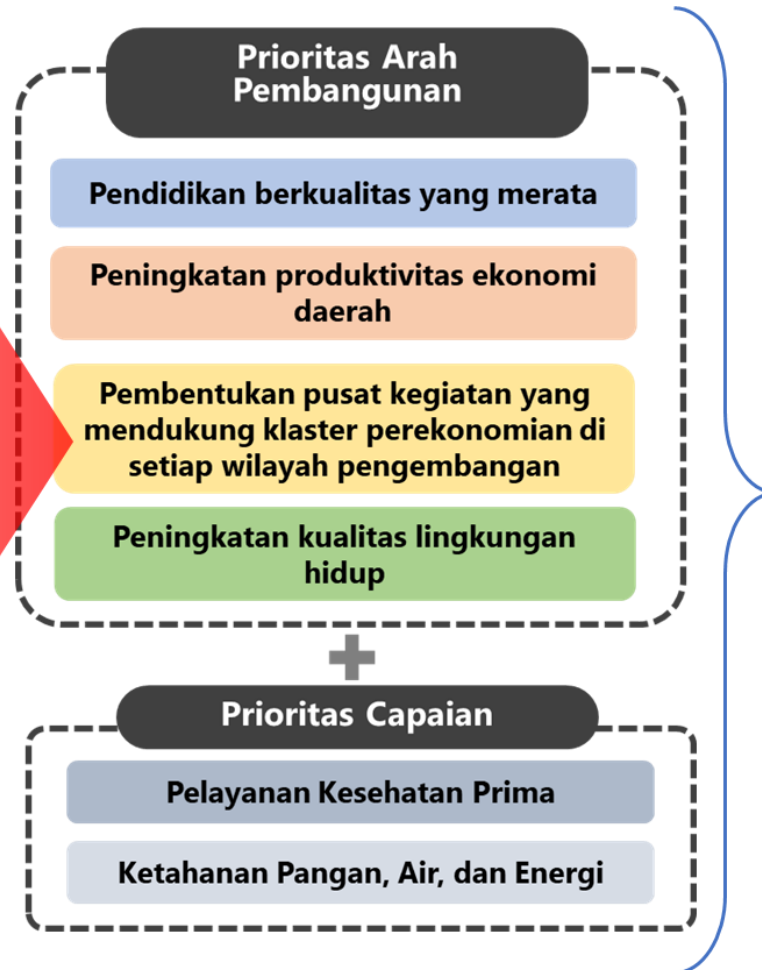
Acuan Skenario 2: Target Pembangunan Jawa Barat 2045

- ❑ Upaya untuk mencapai target jangka panjang yang ditetapkan pada Visi Jawa Barat 2045 dengan membagi proyeksi pencapaian kedalam kerangka waktu yang konsisten bagi pencapaian target setiap periode.
- ❑ Asumsi: Pencapaian pembangunan perlu dibagi merata di setiap tahapan pembangunan untuk mengantisipasi kebutuhan pemrograman berdasarkan proyeksi jangka panjang

REKOMENDASI PROGRAM PEMBANGUNAN 2025-2029



- PERMASALAHAN
- ISU STRATEGIS
- ARAH KEBIJAKAN



VISI Pembangunan Jangka Panjang Prov. JAWA BARAT

**JAWA BARAT TERMAJU, BERDAYA
SAING DUNIA, DAN
BERKELANJUTAN**

TEMA PEMBANGUNAN TAHAP I

FONDASI

1. PENGUATAN FONDASI SDM
2. PENGUATAN FONDASI EKONOMI LOKAL
3. PENGUATAN FONDASI EKONOMI WILAYAH
4. PENGUATAN FONDASI LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN
5. PENGUATAN FONDASI TATA KELOLA PEMBANGUNAN

REKOMENDASI PROGRAM PEMBANGUNAN 2025-2029



Misi 1: Penguatan Fondasi SDM melalui Peningkatan serta Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

- Mewujudkan pendidikan berkualitas dan merata bagi SDM Jawa Barat;
- Mewujudkan layanan kesehatan berkualitas dan merata bagi SDM Jawa Barat
- Mewujudkan ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju;
- Mewujudkan kerukunan umat beragama; serta
- Meningkatkan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender

FONDASI TRANSFORMASI SOSIAL

Misi 2: Penguatan Fondasi Ekonomi Lokal melalui Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah

- Meningkatkan produktivitas ekonomi daerah
- Meningkatkan integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan; dan
- Mengendalikan stabilitas ekonomi makro daerah

FONDASI TRANSFORMASI EKONOMI

Misi 3: Penguatan Fondasi Ekonomi Wilayah melalui Peningkatan Pembentukan Pusat-Pusat Kegiatan pada Klaster Ekonomi dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

- Mewujudkan pembentukan pusat kegiatan yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan
- Mewujudkan pelayanan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah

Misi 4: Penguatan Fondasi Lingkungan Hidup Berkelanjutan melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan-Air-Energi

- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
- Meningkatkan ketahanan pangan, air, dan energi
- Meningkatkan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim; serta
- Meningkatkan penerapan ekonomi hijau

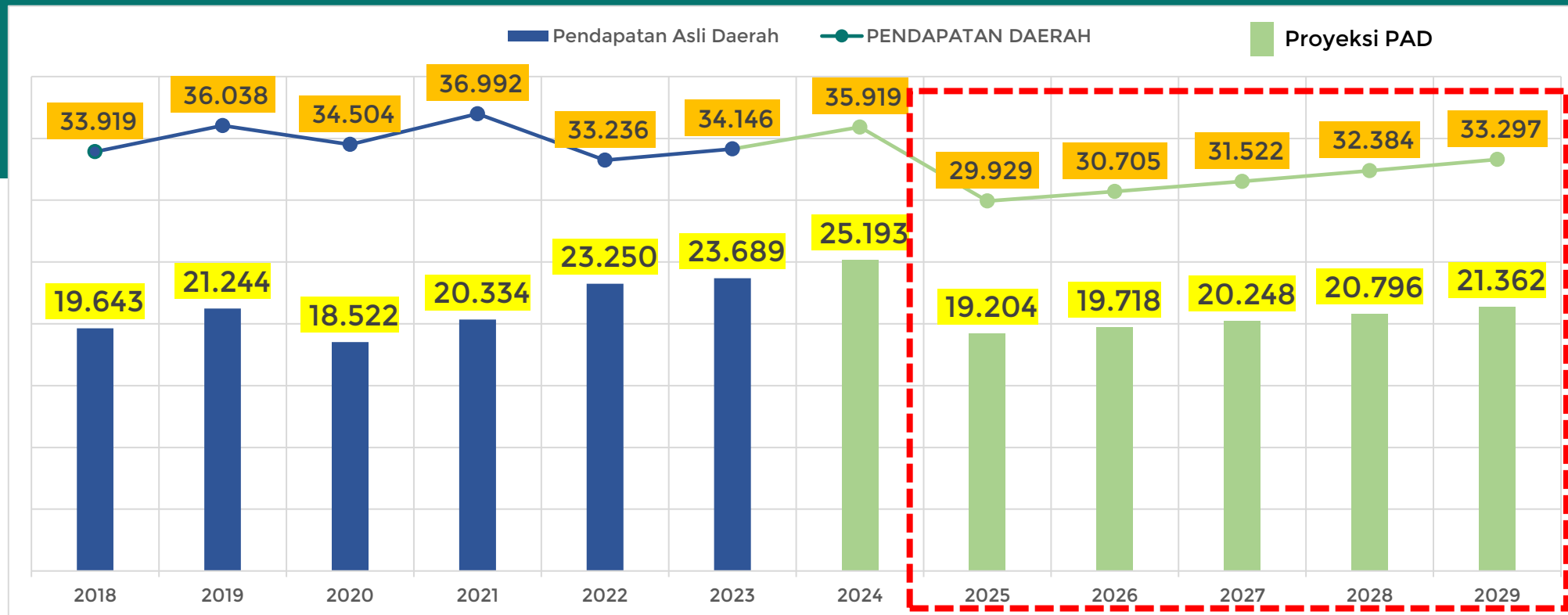
FONDASI LANDASAN TRANSFORMASI

Misi 5: Penguatan Fondasi Tata Kelola Pembangunan

- Mewujudkan transformasi digital
- Mewujudkan peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif
- Meningkatkan kerjasama regional maupun internasional
- Mewujudkan peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas

FONDASI TRANSFORMASI TATA KELOLA

PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2029



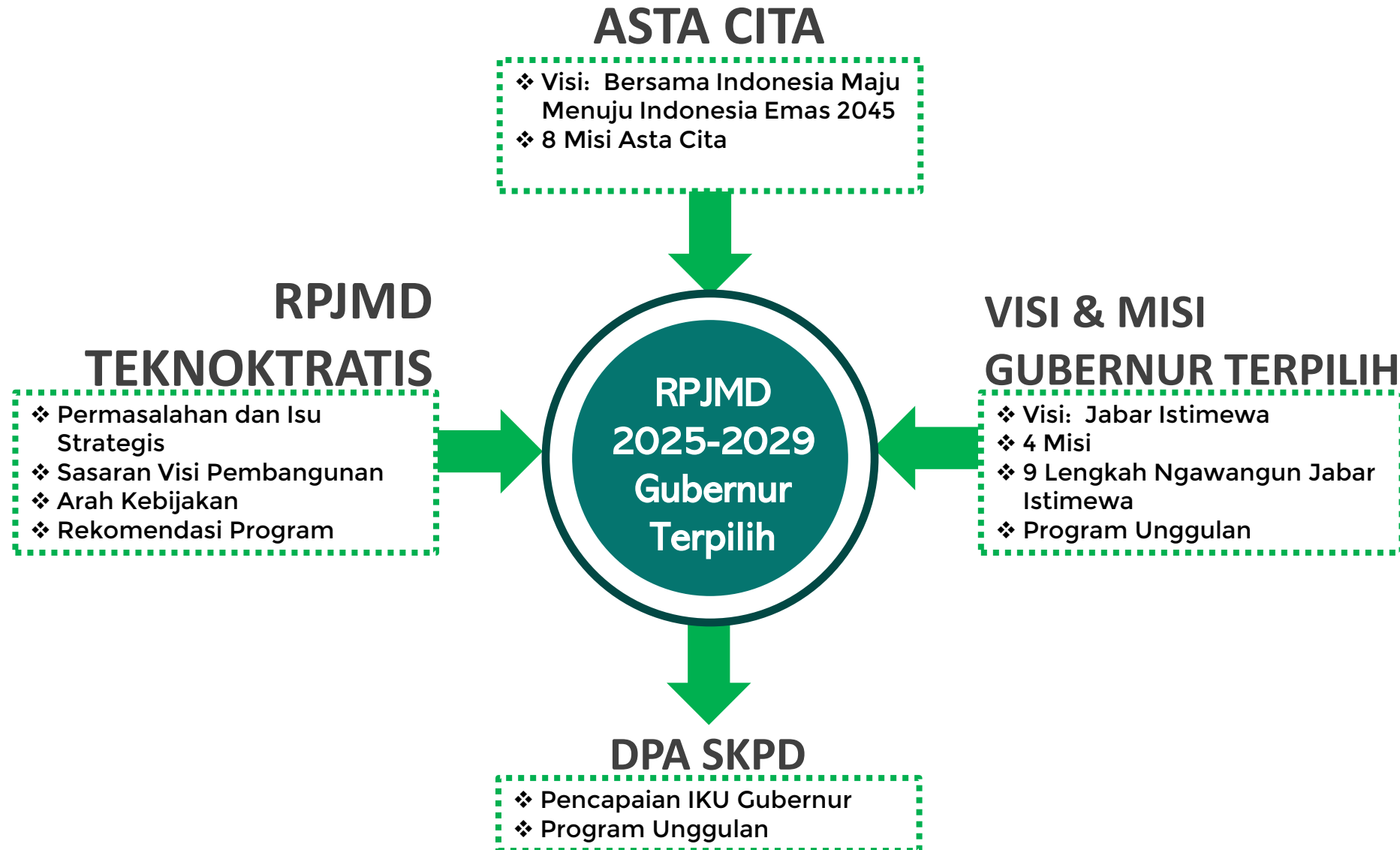
- Pendapatan Provinsi 2025 s.d. 2029 diproyeksikan meningkat



PENYELARASAN RPJMD 2025 - 2029



SINKRONISASI RPJMD 2025-2029





MAKAN BERGIZI GRATIS

01

Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil

PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS

02

Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap

PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN NASIONAL

03

Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional

PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN SEKOLAH

04

Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi

MELANJUTKAN PROGRAM KARTU KESEJAHTERAAN SOSIAL SERTA KARTU USAHA

05

Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut

MENAIKAN GAJI ASN

06

Menaikkan Gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga Kesehatan, dan penyuluh) TNI/POLRI dan Pejabat Negara

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DAN PENYEDIAAN RUMAH MURAH BERSANITASI BAIK

07

Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

MENDIRIKAN BADAN PENERIMAAN NEGARA

08

Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan Meningkatkan Rasio Penerimaan Negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) ke 23%



VISI

JABAR ISTIMEWA



MISI

1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, berpengetahuan, bertaqwa, dan profesional pada bidang tugasnya masing-masing.
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan, berbasis sains, dan teknologi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini.
3. Mengurangi disparitas pembangunan utara-selatan dan mendorong masuknya investasi serta pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lingkungan hidup yang proporsional.
4. Memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan clear governance. .

**Dedi
Mulyadi**

Calon Gubernur
Jawa Barat 2024-2029

**Erwan
Setiawan**

Calon Wakil Gubernur
Jawa Barat 2024-2029





Program Unggulan

Pendidikan

Percepatan program wajib belajar dengan penambahan SMP dan SLTA.

Pembangunan SMK Istimewa di kawasan industri, bekerja sama dengan dunia industri dan usaha untuk menyediakan tenaga kerja siap pakai.

Program Sekolah Manajer untuk 10 ribu peserta.

Penguatan pendidikan budi pekerti dan agama.



Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur jalan yang mulus dan terkoneksi dari jalan nasional hingga jalan desa.



Memperkuat Jabar Sebagai Lumbung Pangan

Perbaikan dan pembangunan irigasi, serta pompanisasi sawah tadah hujan dengan tenaga surya.

Pengembangan pertanian organik yang diintegrasikan dengan peternakan.

Penggunaan alat pertanian modern dan tepat guna.

Mewujudkan jabar sebagai wasemboda sapi

Penataan Kawasan



Penataan tata ruang perkotaan dan pedesaan di Jawa Barat, termasuk menempatkan jaringan listrik, air, dan gas di gorong-gorong bawah jalan.

Mengembangkan arsitektur berbasis budaya Sunda di berbagai daerah, seperti Sunda Kulon, Priangan, Cirebon, dan Sunda Betawi.

Renovasi rumah tidak layak huni.



Lingkungan

Pengelolaan sampah menjadi pembangkit listrik tenaga sampah.

Menghijaukan kembali kawasan hutan yang rusak.

Melindungi dan menyelamatkan mata air.



Kesehatan

Pengembangan rumah sakit unggulan di daerah dengan pusat jantung, kesehatan ibu dan anak, paru, kanker, dan stroke center, sehingga tidak semua rujukan harus ke RS Hasan Sadikin Bandung.

Penanganan stunting sejak masa kehamilan dengan pemeriksaan kesehatan rutin dan asupan gizi yang cukup

Ambulans istimewa dengan dokter pendamping untuk pemeriksaan langsung bagi warga sakit darurat.

Ambulans pesawat untuk daerah terpencil di Jawa Barat.

Laboratorium kesehatan di setiap kecamatan.



Ekonomi

Meningkatkan daya tarik investasi melalui kemudahan perizinan, penyediaan lahan, dan kesiapan tenaga kerja.

Penanggulangan kemiskinan secara terpadu.

Pengembangan usaha muda di berbagai bidang, termasuk start-up.



Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, Guru Agama, Ajengan, Penguatan Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lingkungan dan Transformasi Birokrasi berdampak.



“9 LENGKAH NGAWANGUN JABAR ISTIMEWA (SEMBILAN LANGKAH MEMBANGUN JABAR ISTIMEWA)”



1. Pembangunan Infrastruktur Jalan sampai ke Pelosok Desa dan Permukiman perkotaan;
2. Pembangunan Jaringan Irigasi di Seluruh Wilayah Pertanian, serta mendorong terciptanya ekosistem ekonomi pertanian organik, melalui konektivitas pertanian berbasis kehutanan, peternakan, dan perikanan;
3. Pengembangan Pendidikan berkarakter, SMA/SMK Gratis dan Penambahan Ruang Kelas Baru guna menjaga Kesetaraan Jumlah Ruang Kelas Sekolah Negeri SD, SMP, dan SMA/SMK;
4. Pengembangan Lapangan Kerja Baru, dengan mendorong Investasi di Wilayah Kabupaten/Kota Bertata Ruang Industri, serta Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Smart City;
5. Penyempurnaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota dengan penambahahan layanan khusus, seperti Kesehatan Ibu dan Anak, Penyakit Jantung, Sarana Cuci Darah, Kanker, Penanganan Stroke dengan sarana bedah syaraf, layanan operasi dan layanan lainnya yang selama ini tersentralisasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, serta Pemberian Beasiswa Dokter Spesialis Putra Daerah Sesuai dengan Kelangkaan dan Karakteristik Penyakit Masyarakat;
6. Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan;
7. Mencetak 10.000 Manajer Putra Daerah, melalui Beasiswa di Politeknik Berorientasi Terapan;
8. Pengembangan Pengolaan Sampah Mandiri Sampai Dengan Tingkat RT (Rukun Tetangga); Penataan Kampung Nelayan, tempat pelelangan ikan, pelabuhan pendaratan kapal nelayan serta normalisasi muara di pesisir Jawa Barat;
9. Mendorong peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, Guru Agama, Ajengan, serta Penguatan Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lingkungan dan Transformasi Birokrasi Berdampak



PAKET STIMULUS EKONOMI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



	PAKET STIMULUS EKONOMI UNTUK KESEJAHTERAAN	Rp Triliun
A	RUMAH TANGGA (RT)	21.2
1	Bantuan pangan sebesar 10 Kg untuk 16 juta KPM selama 2 bulan (Jan-Febr 2025)	4.6
2	Diskon listrik 50% untuk pelanggan 2200 VA ke bawah selama 2 bulan (Jan-Febr 2025)	10.0
3	PPN DTP 1% untuk tepung terigu (Rp0,9T), gula industri (Rp0,4T) dan minyak Kita (Rp0,9T)	2.2
4	PPN DTP Properti untuk rumah dengan harga sampai dengan Rp5 M untuk bagian harga Rp2M diberikan 100% pada 6 bulan pertama (Januari-Juni) dan 50% (Juli -Desember)	4.39
B	PEKERJA	
5	Perbaikan kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan diberikan bagi pekerja yang mengalami PHK	
C	UMKM	2.0
6	Perpajakan masa berlaku PPh final 0,5% bagi WP UMKM selama tahun 2025 WP UMKM OP omzet <Rp500 juta per tahun bebas pajak	2.0
D	INDUSTRI PADAT KARYA	1.3
7	PPH 21 DTP untuk industri padat karya (al. Tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan furnitur) dengan gaji maks Rp10 jt per bln	0.8
8	Pembiayaan industri padat karya untuk revitalisasi mesin guna produktivitas dengan subsidi bunga 5%	0.26
9	Bantuan 50% untuk Jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya selama 6 bulan	0.28
E	MOBIL LISTRIK DAN HYBRID	14.04
10	Insentif kendaraan listrik dan Hybrid	
	1. Insentif PPN DTP 10% KBLBB CKD	1.38
	2. PPnBM 0% DTP KBLBB impor CBU dan CKD	4.09
	3. BM 0% KBLBB CBU	7.77
	4. PPnBM DTP 3% kendaraan Hybrid	0.8
	TOTAL	38.6

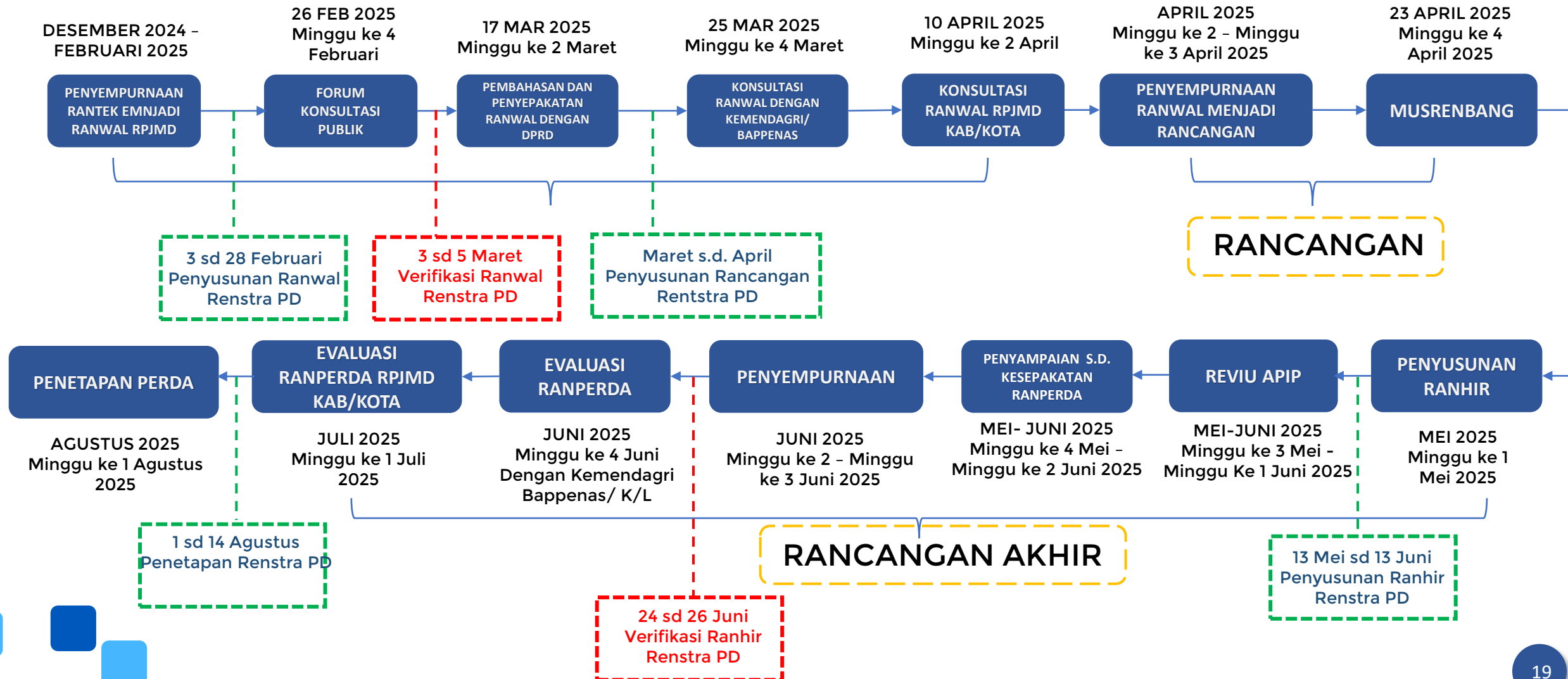
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

MILESTONE AGENDA PENYUSUNAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2029

Provincial Government
of West Java



RANCANGAN AWAL



RENCANA TINDAK LANJUT



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2029

- 01** Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029 diselaraskan dengan Visi Misi Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

- 02** Perangkat Daerah agar segera menyusun rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

RPJMD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025-2029

- 03** Kabupaten/Kota agar segera Menyusun rancangan awal RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029





PERUBAHAN RKPD 2025



PROSES

PERUBAHAN RKPD 2025

Provincial Government
of West Java



RPJPD

2025 - 2045

1. Visi dan Misi
2. Sasaran Visi
3. Arah Kebijakan Tahap I (Fondasi)
4. IUP

RPJPN

2025 - 2045

RPJMD

2025 - 2029

1. Visi Misi Kepala Daerah terpilih
2. Janji Politik
3. IUP
4. Kebijakan dan Program Tahun Pertama

1. Asta Cita
2. 8 Quick Wins
3. Prioritas Nasional
4. Program Strategis Presiden

RPJMN

2025 - 2029

P-RKPD

2025

RKP

2025

1. Prioritas Nasional
2. Isu-Isu Tematik Pembangunan

VISI MISI KDH TERPILIH



VISI

JABAR ISTIMEWA



MISI

1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, berpengetahuan, bertaqwa, dan profesional pada bidang tugasnya masing-masing.
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan, berbasis sains, dan teknologi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini.
3. Mengurangi disparitas pembangunan utara-selatan dan mendorong masuknya investasi serta pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lingkungan hidup yang proporsional.
4. Memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan clear governance. .

TUJUAN RAPBD 2025



VISI & MISI

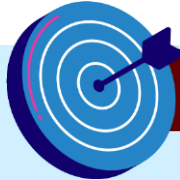
Tidak ada Visi Misi pada Raperda APBD 2025



TUJUAN

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
3. Terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan
4. Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah





VISI

IDENTIFIKASI KEGIATAN 2025 TERHADAP JANJI POLITIK KDH 2025-2029



1

INFRASTRUKTUR ISTIMEWA

1. **Infrastruktur Jalan** ke Pelosok Desa dan Permukiman Perkotaan (**Jalan Leucir**)
2. **Jaringan Irigasi** ke seluruh wilayah pertanian (**Cai Ngilir**)

Indikasi Kegiatan 2025

1. Jalan Mulus
2. OP Irigasi/Situ
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi

2

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ISTIMEWA

1. Terwujudnya **Birokrasi** yang jujur, bersih dan tulus melayani masyarakat

Indikasi Kegiatan 2025

1. Penyelenggaraan Pengawasan oleh APIP
2. Peningkatan IP ASN Dimensi Kompetensi

3

PENDIDIKAN ISTIMEWA

1. Layanan **Pendidikan** berkarakter
2. **SMA/SMK Gratis**
3. Penambahan **Ruang Kelas Baru**
4. **10 ribu manajer putra daerah** (Beasiswa)

Indikasi Kegiatan 2025

1. Jabar Masagi
2. BOPD & GTK
3. BPMU
4. USB
5. JFLS

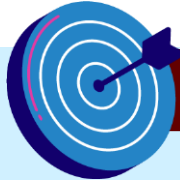
4

KESEHATAN ISTIMEWA

1. **Terjaminnya** seluruh **layanan Kesehatan** Masyarakat
2. Terwujudnya **RSUD Kab/Kota** dengan **layanan khusus**, seperti: Kesehatan Ibu&Anak, Penyakit Jantung, Sarana Cuci Darah, Kanker, Stroke Bedah Syaraf, dan layanan lainnya
3. **Beasiswa dokter spesialis**
4. **Industri Pengobatan** kearifan lingkungan

Indikasi Kegiatan 2025

1. PBI-JK
2. Bankeu PBPU
3. BLUD Rumah Sakit



VISI

IDENTIFIKASI KEGIATAN 2025 TERHADAP JANJI POLITIK KDH 2025-2029



5 PERTANIAN ISTIMEWA

1. Terciptanya **ekosistem ekonomi pertanian organik** melalui konektivitas pertanian berbasis kehutanan, Perkebunan, peternakan, dan perikanan

Indikasi Kegiatan 2025

1. Regenerasi Petani
2. Pengelolaan hutan rakyat
3. CPPD
4. Pengadaan Pupuk
5. Bibit Ternak dan Bibit Pertanian

6 LINGKUNGAN HIDUP ISTIMEWA

1. Pengembangan **pengelolaan sampah mandiri** sampai tingkat RT
2. **Penataan Kampung Nelayan**
3. **Tempat Pelelangan Ikan**
4. **Pelabuhan Pendaratan Kapal Nelayan**
5. **Normalisasi Muara** di pesisir Jawa Barat

Indikasi Kegiatan 2025

1. Air Minum, Limbah Domestik, dan Persampahan
2. Penataan Kawasan Kumuh
3. Pengembangan Pelabuhan
4. Normalisasi Sungai

7 EKONOMI DAN TATA RUANG ISTIMEWA

1. Terwujudnya **lapangan kerja baru**
2. **Mendorong investasi** di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri
3. **Pengembangan Pariwisata**
4. **Ekonomi Kreatif**
5. **Smart City**

Indikasi Kegiatan 2025

1. BP Rebana
2. Promosi Investasi
3. WJIS
4. Penyusunan IPRO
5. Promosi Pariwisata
6. Desa Wisata

8 KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA ISTIMEWA

1. Terwujudnya **peningkatan kesejahteraan** Kepala Desa, Perangkat Desa, RT, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, Guru Agama, Ajengan
2. **Penguatan Pembangunan Desa berbasis kearifan lingkungan** dan transformasi birokrasi berdampak

Indikasi Kegiatan 2025

1. Bankeu Pokjanal Posyandu
2. Bankeu Khusus Desa
3. Pendamping Posyandu Juara



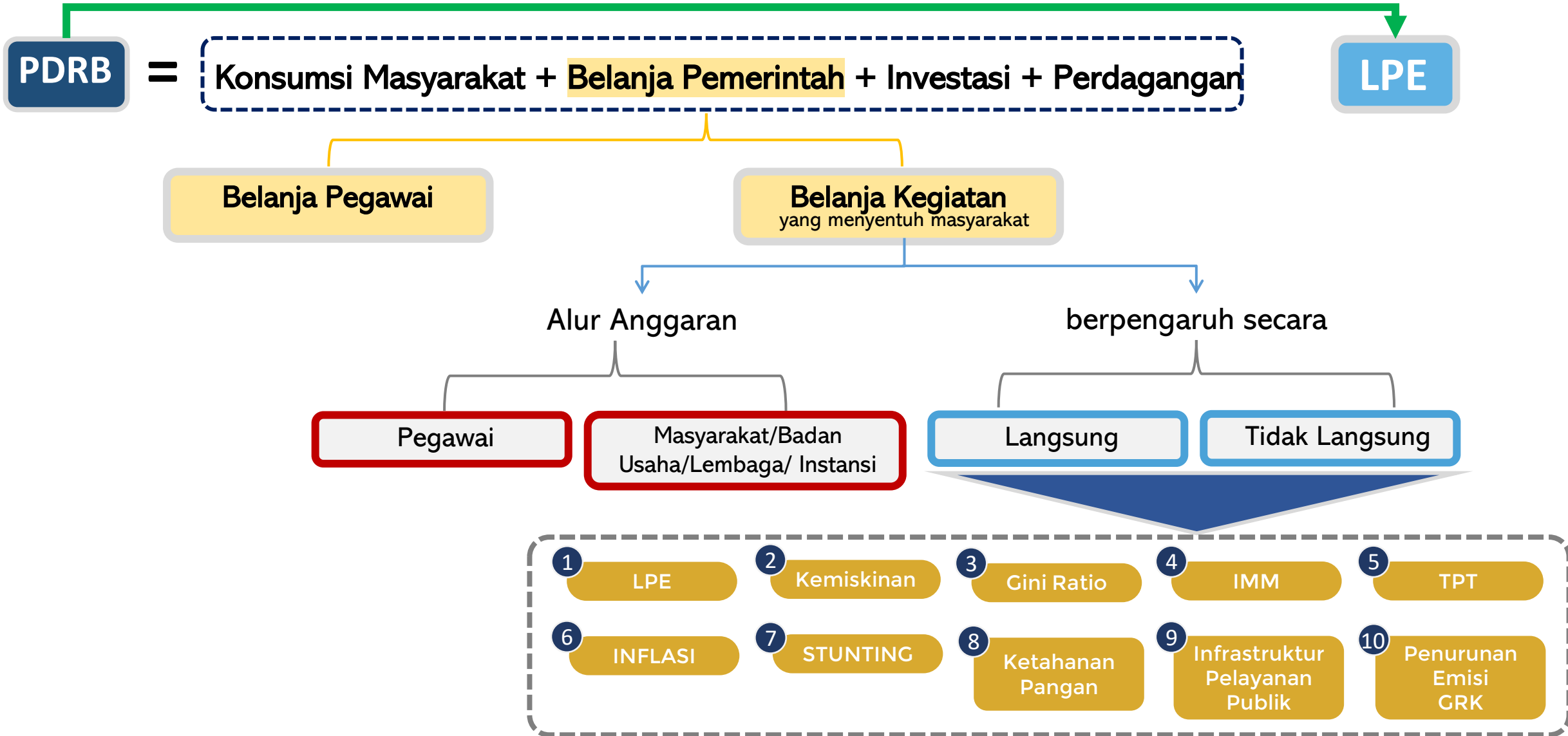
PEMETAAN BELANJA KEGIATAN APBD 2025





KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI DI JAWA BARAT

Provincial Government
of West Java



CONTOH PEMETAAN PENGARUH BELANJA TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR MAKRO DI PROVINSI JAWA BARAT

Provincial Government
of West Java





PEMETAAN KOMPONEN BELANJA

Belanja Kegiatan

Penerima Dana Belanja APBD

Pegawai

Contoh:

1. Gaji Tenaga Non ASN
2. Uang Harian Perjalanan Dinas
3. Uang Saku Diklat
4. Dll.

Masyarakat / Badan
Usaha/ Lembaga

Contoh:

1. Bantuan Sosial
2. Operasi Pasar
3. Bantuan Pupuk
4. Pemeliharaan Kendaraan
5. Mamin Rapat
6. Perhotelan
7. Dll.

HASIL PEMETAAN SEMENTARA R-APBD 2025

PENERIMA LANGSUNG ANGGARAN

Provincial Government
of West Java



TOTAL ANGGARAN RAPBD 2025

Rp.31.075.544.907.123,-

BELANJA PEGAWAI

Untuk Gaji dan Tunjangan ASN, KDH, dan
DPRD

28,7%

Rp.8.919.314.390.536,-

Termasuk Tunjangan Profesi Guru dan
Tamsil Guru

BELANJA KEGIATAN

Untuk Masyarakat/ Badan Usaha/ Lembaga/
Instansi

66,1%

Rp.20.533.495.678.896,-

Termasuk:
Belanja Bagi Hasil, Belanja Tidak Terduga,
Belanja Bantuan Sosial, Belanja Subsidi,
Belanja Modal, Belanja Barjas

BELANJA KEGIATAN

Untuk Pegawai

5,22%

Rp.1.622.734.837.691,-

Contoh Komponen:
Honorarium Tenaga Teknis, Iuran untuk
Tenaga Teknis, Biaya Diklat, Uang Harian
(Perjadin, Fullboard, Fullday, Representatif,
PDLN)

HASIL PEMETAAN SEMENTARA R-APBD 2025

PENERIMA LANGSUNG ANGGARAN

NO	NAMA SKPD	Belanja Pegawai		Belanja Kegiatan				Grand Total
		Gaji dan Tunjangan ASN, KDH dan DPRD	%	Masyarakat/ Badan Usaha/ Lembaga/ Instansi	%	Pegawai	%	
1	Badan Kepegawaian Daerah	48.248.062.274	65,70%	20.163.976.076	27,46%	5.022.837.182	6,84%	73.434.875.532
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.973.558.424	3,67%	457.742.040.258	93,57%	13.473.306.801	2,75%	489.188.905.483
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.238.764.611	39,83%	18.171.247.302	44,57%	6.362.571.835	15,61%	40.772.583.748
4	Badan Pendapatan Daerah	294.325.832.353	52,77%	214.808.551.142	38,51%	48.616.447.506	8,72%	557.750.831.001
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	17.444.423.163	65,81%	6.302.834.810	23,78%	2.761.102.974	10,42%	26.508.360.947
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	43.266.810.043	0,46%	9.291.898.126.013	99,39%	13.318.013.997	0,14%	9.348.482.950.053
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35.986.640.130	53,37%	25.211.131.216	37,39%	6.227.443.269	9,24%	67.425.214.615
8	Badan Penghubung	7.395.655.237	54,88%	3.810.908.919	28,28%	2.270.385.425	16,85%	13.476.949.581
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	40.764.388.111	48,86%	33.060.532.988	39,63%	9.598.337.698	11,51%	83.423.258.797
10	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	112.802.323.486	12,21%	704.066.143.961	76,21%	106.954.681.663	11,58%	923.823.149.110
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	67.683.748.681	33,64%	119.632.279.803	59,46%	13.872.730.065	6,90%	201.188.758.549
12	Dinas Kehutanan	194.945.013.185	74,02%	61.914.609.565	23,51%	6.509.784.998	2,47%	263.369.407.748
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	52.167.052.444	34,27%	86.288.078.220	56,68%	13.777.562.323	9,05%	152.232.692.987
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.688.669.787	64,79%	4.175.031.708	25,31%	1.633.955.283	9,90%	16.497.656.778
15	Dinas Kesehatan	1.013.502.212.475	41,06%	932.168.583.422	37,77%	522.497.754.652	21,17%	2.468.168.550.549
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	88.763.340.994	39,20%	110.999.660.661	49,03%	26.647.145.302	11,77%	226.410.146.957
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	38.651.494.771	17,84%	164.526.468.227	75,94%	13.484.303.716	6,22%	216.662.266.714
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	22.938.048.696	23,12%	54.780.404.691	55,22%	21.491.819.599	21,66%	99.210.272.986
19	Dinas Lingkungan Hidup	37.883.568.466	26,81%	92.405.402.981	65,39%	11.017.227.019	7,80%	141.306.198.466
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	44.672.535.042	35,15%	69.948.583.580	55,03%	12.486.051.561	9,82%	127.107.170.183
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.810.021.548	31,91%	42.084.344.689	54,13%	10.845.329.751	13,95%	77.739.695.988
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	19.231.521.533	39,49%	12.241.469.982	25,13%	17.232.616.118	35,38%	48.705.607.633
23	Dinas Pemuda dan Olahraga	26.852.035.990	4,85%	511.951.419.846	92,40%	15.252.361.152	2,75%	554.055.816.988

HASIL PEMETAAN SEMENTARA R-APBD 2025

PENERIMA LANGSUNG ANGGARAN

NO	NAMA SKPD	Belanja Pegawai		Belanja Kegiatan				Grand Total
		Gaji dan Tunjangan ASN, KDH dan DPRD	%	Masyarakat/ Badan Usaha/ Lembaga/ Instansi	%	Pegawai	%	
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	32.558.074.145	53,59%	21.258.582.415	34,99%	6.937.868.832	11,42%	60.754.525.392
25	Dinas Pendidikan	5.424.543.080.899	48,24%	5.684.776.366.226	50,56%	135.384.875.989	1,20%	11.244.704.323.114
26	Dinas Perhubungan	60.801.303.060	19,41%	226.644.291.081	72,35%	25.818.942.630	8,24%	313.264.536.771
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	65.227.251.078	42,24%	78.079.583.613	50,56%	11.109.724.641	7,19%	154.416.559.332
28	Dinas Perkebunan	45.735.163.770	41,43%	32.207.121.347	29,18%	32.442.992.346	29,39%	110.385.277.463
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	38.896.579.857	73,40%	10.543.060.889	19,90%	3.550.322.263	6,70%	52.989.963.009
30	Dinas Perumahan dan Permukiman	35.072.884.904	18,68%	138.265.739.863	73,64%	14.410.914.928	7,68%	187.749.539.695
31	Dinas Sosial	86.202.965.010	45,83%	83.994.312.673	44,65%	17.911.716.423	9,52%	188.108.994.106
32	Dinas Sumber Daya Air	63.429.727.870	19,34%	185.919.729.998	56,68%	78.642.166.276	23,98%	327.991.624.143
33	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	185.837.579.999	50,46%	78.629.758.637	21,35%	103.831.952.394	28,19%	368.299.291.030
34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	104.673.601.987	66,21%	44.938.676.801	28,42%	8.492.199.377	5,37%	158.104.478.165
35	Inspektorat	44.024.613.071	44,09%	40.999.142.260	41,06%	14.826.263.311	14,85%	99.850.018.642
36	Satuan Polisi Pamong Praja	26.196.430.662	56,06%	15.976.213.530	34,19%	4.556.644.437	9,75%	46.729.288.629
37	Biro Administrasi Pimpinan		0,00%	37.556.872.888	63,24%	21.833.447.278	36,76%	59.390.320.166
38	Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan		0,00%	6.082.727.959	80,97%	1.429.827.395	19,03%	7.512.555.354
39	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia		0,00%	5.916.377.464	66,85%	2.933.622.536	33,15%	8.850.000.000
40	Biro Kesejahteraan Rakyat		0,00%	384.509.066.101	96,65%	13.325.951.346	3,35%	397.835.017.447
41	Biro Organisasi		0,00%	3.528.095.000	75,39%	1.151.905.000	24,61%	4.680.000.000
42	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		0,00%	14.801.517.353	63,72%	8.426.431.349	36,28%	23.227.948.702
43	Biro Pengadaan Barang/Jasa		0,00%	6.124.437.008	64,91%	3.310.562.992	35,09%	9.435.000.000
44	Biro Perekonomian		0,00%	6.966.184.903	66,62%	3.489.632.223	33,38%	10.455.817.126
45	Biro Umum	224.672.280.463	56,03%	97.821.522.038	24,39%	78.514.267.786	19,58%	401.008.070.287
46	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	204.207.132.317	32,79%	289.604.468.789	46,50%	129.048.836.051	20,72%	622.860.437.157
TOTAL		8.919.314.390.536	28,70%	20.533.495.678.896	66,08%	1.622.734.837.691	5,22%	31.075.544.907.123

HASIL PEMETAAN SEMENTARA R-APBD 2025

PENERIMA LANGSUNG ANGGARAN



Dinas Perkebunan

Uraian Belanja untuk Pegawai	Nominal (Rp)
Besaran Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota	4.050.000
Besaran Uang Transport Narasumber / Asesor	253.400.000
Honorarium Non ASN Lainnya - Kepala Tukang	250.000.000
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Ketua/Wakil Ketua	3.000.000
Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan	10.029.547.342
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Ketua	85.000.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Penanggung Jawab	112.500.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Wakil Ketua	2.550.000
Iuran Jaminan Hari Tua Tenaga Non ASN	51.107.520
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Non ASN	3.314.904
Iuran Jaminan Kematian Tenaga Non ASN	4.143.696
Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Non ASN	55.249.104
Uang Harian Diklat	23.380.000
Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard / Residence	798.750.000
Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday / Halfday	67.415.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.359.234.780
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi	340.350.000
Jumlah	32.442.992.346

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Uraian Belanja untuk Pegawai	Nominal (Rp)
Besaran Uang Representasi Perjalanan Dinas dalam Kota (Lebih dari 8 Jam)	270.000.000
Besaran Uang Transport Narasumber / Asesor	235.500.000
Besaran Uang Transport Narasumber / Asesor	30.800.000
Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan	78.417.528.141
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Anggota	30.000.000
Iuran Jaminan Hari Tua Tenaga Non ASN	2.415.773.728
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Non ASN	156.653.448
Iuran Jaminan Kematian Tenaga Non ASN	195.820.512
Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Non ASN	2.610.712.608
Uang Harian Diklat	195.000.000
Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard / Residence	1.300.500.000
Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday / Halfday	378.725.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.660.338.957
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota - Jawa Barat	3.026.850.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi	907.750.000
Jumlah	103.831.952.394

DP3AKB

Uraian Belanja untuk Pegawai	Nominal (Rp)
Besaran Uang Representasi Perjalanan Dinas dalam Kota (Lebih dari 8 Jam)	6.400.000
Besaran Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota	21.450.000
Besaran Uang Transport Narasumber / Asesor	150.500.000
Besaran Uang Transport Narasumber / Asesor	29.700.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan - Diklat PIM III	44.250.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan - Diklat PIM IV	20.230.000
Honorarium Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan	13.831.089.153
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Anggota	9.000.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Pengarah	831.600.000
Iuran Jaminan Hari Tua Tenaga Non ASN	35.913.672
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Non ASN	35.685.997
Iuran Jaminan Kematian Tenaga Non ASN	41.198.120
Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Non ASN	38.824.176
Uang Harian Diklat	31.720.000
Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullboard / Residence	57.600.000
Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Fullday / Halfday	70.875.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.762.140.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi	214.440.000
Jumlah	17.232.616.118



TERIMA KASIH

“Sukses Perencanaan Sukses Implementasi”

Jalan Ir. H. Juanda No.287, Dago, Coblong,
Kota Bandung, Jawa Barat | 40135

Telp : (022) 25 16065 | Fax (022) 2510731
Email : public@bappeda.jabarprov.go.id

 Bappeda Jabar  [bappedajabar](https://twitter.com/bappedajabar)  [bappedajabar](https://www.instagram.com/bappedajabar)  Bappeda Provinsi Jawa Barat

bappeda.jabarprov.go.id